

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010. *Dualisme dalam Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

—————. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asikin, Zainal Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Bayuaji, Rihantoro. 2019. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.

Harahap, M Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Khaleed, Badriyah. 2014. *Panduan Hukum Acara Hukum*. Jakarta: Medpress Digital.

Marzuki, Mahmud Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moelong, J Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakya.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugianto. 2018. *Hukum Acara Peradilan Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Syamsuddin, Aziz. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3998)

### C. Jurnal dan Internet

Alfian Putra Abdi. *Aparat Penegak Hukum (KPK, Polri, dan Kejaksaan) hanya mengungkapkan 271 kasus korupsi di Indonesia*. [tirto.id/icw-penanganan-korupsi-selama-2019-anjlok-modus-suap-mendominasi-ezNs](http://tirto.id/icw-penanganan-korupsi-selama-2019-anjlok-modus-suap-mendominasi-ezNs). diakses pada tanggal 21 Oktober 2020. pukul 22.03.

Anthonius dan Tan Ming Kuang. Maret 2011. “*Pengukuran Sumber Daya Manusia Sebagai Aset Perusahaan dengan Menggunakan Metode Replacement Cost*”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 4 No 1.

Badan Pusat Statistik Online. [Jatim.bps.go.id](http://Jatim.bps.go.id). diakses pada tanggal 21 Oktober 2020. pukul 21.43.

Dessy Rochman Prasetyo. Agustus 2016. “*Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*”. DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12 Nomor 24.

Faisal Santiago. Juli 2017. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Umum*”. Pagaruyuang Law Journal, Volume 1 No 1.

Ike Farida. 2013. “*Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan International Accounting Standard 41 pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)*”. Jurnal Akuntansi AKUNESA, Volume 2 No 1.

Indeks Persepsi Korupsi 10 Negara Asean (2017-2018). “*Naik 1 Poin Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik ke Peringkat 4 di ASEAN*”. [databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/naik-1-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-ke-peringkat-4-di-asean](http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/naik-1-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-ke-peringkat-4-di-asean). diakses pada tanggal 17 Oktober 2020. pukul 14.09.

Juangga Saputra Dalimunthe. September 2020. *“Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol 1, No 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aset>. diakses pada tanggal 18 Oktober 2020. pukul 14.09.

Komisi Pemberantasan Korupsi Online. *KPK.go.id*. diakses pada tanggal 21 Oktober 2020. pukul 21.54.

Krisdianto. Desember 2015. *“Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga”*. Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12.

Linda Ufa dkk. Agustus 2017. *“Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana”*. Kanun Law Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 No 2.

Lintang Tesalonika Natalia Luntungan. April-Juni 2013. *“Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”*. Lex Crimen, Volume II No 2.

Muhamad Nur Ibrahim. Mei 2016. *“Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi”*. Jurnal Katalogis. Volume 4 No 5.

Nanang Irawadi. Maret 2019. *“Execution Of Confiscated Goodsmeasures Of Corruption Which Is Not According To The Value Of States Losses In West Sumatra High Prosecutor’s Office”*. Unes Law Review Volume 1 Issue 3.

Revrisond Baswir. September 2002. *“Dinamika Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Struktural”*. Jurnal Universitas Paramadina, Volume 2 No 1.

Silva Da Rosa. Maret 2018. *“Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar”*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 2.

Super User. *Mengapa Aset Koruptor Harus Disita*, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/aset-koruptor-mengapa-harus-disita>. diakses pada tanggal 04 November 2020. pukul 02.42.

**D. Lain-Lain**

Wawancara dengan Bapak Nur Rachmansyah, S.H.,M.H selaku Kasubsi Penuntutan Bagian Pidana Khusus (Tindak Pidana Korupsi) di Kejaksaan Negeri Surabaya